



ANALISIS FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI RIAU

SKRIPSI



Oleh

FIKRIYATUL A'LA
11675201421

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ANALISIS FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI RIAU

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral Comprehensive
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1) Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu
Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



Oleh

FIKRIYATUL A'LA
11675201421

PROGRAM S1

JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : FIKRIYATUL A'LA
 NIM : 116752041
 FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
 JUDUL : ANALISIS FUNGSI BADAN NARKOTIKA
 MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI
 RIAU

Disetujui oleh:

Pembimbing

Muslim, S.Sos, M.Si
NIP. 19820205 201503 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Ketua Jurusan

Ilmu Administrasi Negara



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M, Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

DR. Kamaruddin, S.Sos, M.Si
NIP 19790101 200710 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : FIKRIYATUL A'LA
NIM : 116752041
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
JURUSAN : ADMINISTRASI NEGARA
JUDUL : ANALISIS FUNGSI BADAN NARKOTIKA
 MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI
 RIAU
TANGGAL UJIAN : 21 JULI

DISETUJUI OLEH

KETUA PENGUJI

Sahwitri T. Mandani, SE, M.Si
 NIP. 19820806 200604 2 002

MENGETAHUI

PENGUJI I

Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002

PENGUJI II

Roni Jaya, S.Sos, M.Si
 NIK. 130 717 060



ANALISIS FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI RIAU

ABSTRAK

Oleh :

Fikriyatul A'la
11675201421

Indonesia sebagai negara kepulauan, dijadikan pintu gerbang keluar masuk barang dari negara atau daerah lain, tidak terkecuali narkoba. Sekitar 80% peredaran narkoba terjadi di perairan Indonesia. Peredaran narkoba di Provinsi Riau selalu meningkat, pada tahun 2019 Riau berada pada peringkat ke-5 terbesar kasus narkoba. Jalur laut mereka jadikan sebagai celah yang menguntungkan untuk membawa narkoba masuk ke Provinsi Riau. Penulisan skripsi ini mendeskripsikan analisis fungsi Badan Narkotika Nasional dalam mencegah peredaran narkoba di Provinsi Riau. Informan penelitian terdiri dari 10 orang berdasarkan teknik purposive sampling yang terdiri dari Kabid Berantas, Kabid P2M, Kasi P2, Staff P2M, Kassubag Administrasi, serta masyarakat. Adapun metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu menyimpulkan hasil wawancara yang diperoleh dari jawaban responden kemudian dianalisa dengan menguraikan permasalahan yang ada sehingga memberikan interpretasi terhadap hasil yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa analisis fungsi Badan Narkotika Nasional mencegah peredaran narkoba di Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Presiden No 23 tahun 2010 sudah dilakukan melalui program pencegahan; sosialisasi anti narkoba, pembentukan Satgas / relawan anti narkoba, penyuluhan, dan melalui kerjasama antara BNN dengan kepolisian, lembaga pendidikan, pemerintah dan swasta serta masyarakat, akan tetapi adanya kendala dana dan kurangnya tingkat kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba.

Kata Kunci : Fungsi, Peredaran, Narkoba, Pencegahan, Kerjasama

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

AlhamdulillahRobilli'alamiin, segala puji hanya milik Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa memberikan kenikmatan dan kesehatan tiada henti-hentinya, memberikan kesabaran dan kegigihan dalam proses penyelesaian skripsi ini. shalawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada baginda rasulullah SAW sebagai Ushwatun Hasanah utusan Allah sehingga umatnya terhindar dari buta ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL MENCEGAH PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI RIAU”**. Skripsi ini diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarja pendidikan S1 pada prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari begitu banyak kendala dan cobaan, namun berkat bantuan, motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai keluarga, segala macam kendala yang dihadapi dapat di atasi dengan baik. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Syafrudin dan Ibunda Nelmi yang telah melahirkan, membesarkan, dan mendidik penulis sehingga sampai seperti saat ini. Serta saudara kandung penulis kakak Nelli Susanti, Resnawati, Rusnawati, Niswatul Hasanah dan Abang Joni Efendi yang

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selalu mendukung dan selalu memberikan do'a kepada penulis. Terima kasih yang tak terhingga karena telah memberikan segala dukungan yang luar biasa kepada penulis. Baik berupa kasih sayang, dukungan moral dan materi serta do'a yang tak pernah ada hentinya selalu diberikan dengan ikhlas kepada penulis, semoga Allah SWT selalu melindungi, memberikan kesehatan serta rezeki kepada kedua orang tua serta keluarga penulis, Amiin.

Terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, Wakil Rektor I Bapak Drs. H. Suryana A. Jamrah, MA, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Kusnedi, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Drs. H. Promodi, MA,Ph.D, yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Perguruan Tinggi ini.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Bapak Dr. Drs. H. Muh. Said, M.Ag, beserta Wakil Dekan I Ibu Dr. Leny Nofianti, M.S.,S.E.,M.Si.,Ak, Wakil Dekan II Ibu Dr. Juliana, S.E,M.Si, serta Wakil Dekan III Bapak Dr. Amrul Muzan, S.HI, M.Ag, dan staff pegawai Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberi rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian ini.
3. Ketua Jurusan administrasi Negara Bapak Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si, beserta sekretaris Jurusan Administrasi Negara Bapak Jhon Afrizal yang telah meng-Acc judul penelitian ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penasehat Akademik penulis Bapak Rusdi, S.Sos, MA, yang sudah memberikan motivasi dan nasehat kepada penulis selama menjadi anak didiknya.
5. Pembimbing skripsi penulis Bapak Muslim S.Sos M.Si yang telah memberikan kemudahan, bantuan, arahan, dan motivasi yang bermanfaat kepada penulis dari awal proposal hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberi ilmu pengetahuan kepada penulis.
7. Kepada seluruh pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau yang telah membantu penulis dengan informasi yang dibutuhkan oleh penulis.
8. Sahabat tercinta yang sudah seperti Keluarga Ismayanti Harahap, Yunita Asma, Nur'aini, Annisa, Putri yang selama ini selalu ada disaat penulis selalu membutuhkan bantuan dan jadi penyemangat dalam mengerjakan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat seperjuangan Jurusan Administrasi Negara Angkatan 2016 terkhusus lokal B dan sahabat lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
10. Untuk teman KKN Desa Lubuk Bilang Nur'aini, Reza Wijayani Ervian, Mayawi Fitri Sari, Rani, Ema yohana Daulay, Tika Arwina, Ryan, Deri, Azmi dan Ilmi yang telah memberikan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Berbagai pihak yang telah membantu baik secara langsung ataupun tidak langsung sehingga dapat terselesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya serta do'a yang tiada henti, rasa syukur yang teramat besar penulis haturkan kepada-Nya, Atas segala Izin dan limpahan berkah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Semoga amal kebajikan semua pihak yang telah membantu diterima disisi-Nya dan diberikan pahala berlipat ganda sesuai dengan amal perbuatannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Amiin Ya Rabbal 'Alamin.

Pekanbaru, Juni 2020

Penulis

FIKRIYATUL A'LA
NIM. 11675201421

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Badan Narkotika Nasional	11
2.2 Kebijakan Publik	11
2.3 Fungsi Badan Narkotika Nasional.....	16
2.4 Narkotika.....	19
2.5 Tindakan Pencegahan.....	22
2.6 Interaksi Sosial	24
2.7 Penyakit Masyarakat	24
2.8 Penelitian Terdahulu	25
2.9 Pandangan Islam Tentang Narkoba.....	27
2.10 Defenisi Konsep	30
2.11 Indikator Penelitian	31
2.12 Kerangka Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.3 Sumber Data.....	34
3.4 Metode Pengumpulan Data	35
3.5 Informan Penelitian	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

3.6 Analisis Data	36
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
4.1 Badan Narkotika Nasional	39
4.2 Profil Badan Narkotika Nasional	39
4.2.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau	39
4.2.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau	41
4.3 Tujuan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau	41
4.4 Uraian Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau.....	42
4.5 Tugas Pokok dan Fungsi	44
4.6 Kondisi Saat Ini.....	48
4.7 Struktur Organisasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau	50

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Fungsi Badan Narkotika Nasional Mencegah Peredaran Narkotika di Provinsi Riau	52
5.1.1 Sosialisasi Anti Narkotika	54
5.1.2 Penyuluhan Narkotika	60
5.1.3 Pembentukan Satgas dan Penggiat Anti Narkotika	66
5.2 Kerjasama dalam Mencegah dan Memberantas Peredaran Narkotika di Provinsi Riau	70
5.2.1 Kepolisian	72
5.2.2 Lembaga Pendidikan	74
5.2.3 Instansi Pemerintah dan Swasta	76
5.2.4 Masyarakat	77
5.3 Faktor Penghambat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Melakukan Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Riau.....	79

BAB V

KESIMPULAN

6.1 Kesimpulan	83
6.2 Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik Himpunan Ulama Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penyalahguna Narkoba Seindonesia 2017.....	4
Tabel 1.2 Data Kerawanan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Provinsi Riau.....	4
Tabel 1.3 Data Pelaksanaan Sosialisasi Bnnp Riau Tahun 2018-2019.....	5
Tabel 1.4 Kasus Peredaran Narkoba 2017-2018.....	6
Tabel 1.5 Data Pengguna Narkotika Yang Menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan Diklinik Pratama BNN Provinsi Riau	7
Tabel 2.1 Indikator Penelitian.....	31
Tabel 2.2 Kerangka Pemikiran.....	32
Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian.....	34
Tabel 3.2 Informan Penelitian.....	36
Tabel 5.1 Kasus Peredaran Narkoba 2017-2019.....	52
Tabel 5.2 Data Pelaksanaan Sosialisasi Bnnp Riau Tahun 2018-2019.....	59
Tabel 5.3 Data Relawan & Penggiat Anti Narkoba Di Provinsi Riau	69

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1 Kegiatan Sosialisasi Di Car Free Day	56
Gambar 5.2 Postingan Di Akun Media Sosial Instagram Bnn Provinsi Riau.....	57
Gambar 5.3 Akun Media Sosial Instagram Bnnp Riau	62
Gambar 5.4 Pelaksanaan Tes Urin Terhadap Asn Dan Tenaga Kontrak Provinsi Riau Di Kantor Gubernur	64
Gambar 5.5 Standar Layanan Tes Urine Narkotika Untuk Deteksi Dini.....	65
Gambar 5.6 Pembentukan Satgas Anti Narkoba Di Lingkungan Pemerintahan	67
Gambar 5.7 Rapat Koordinasi Antara Bnn Dengan Kapolda Riau.....	74



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan obat dari tanaman yang dapat menghilangkan kesadaran dan menimbulkan ketergantungan. Narkotika sudah menjadi masalah utama yang akan mengancam bangsa ini. Dari sisi usia, narkotika juga tak pernah memilih korbannya, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan sampai lanjut usia. Indonesia merupakan surga bagi peredaran narkotika. Betapa tidak, jika ditilik dari peringkat peredaran narkotika di dunia, negara Indonesia pada tahun 2018 menempati peringkat keenam sebagai pasar narkotika terbesar di dunia. Pada umumnya, pengedar narkotika adalah para remaja dan warga yang kurang mampu. Kekurangan ilmu pengetahuan serta pemahaman yang lebih dalam mengenai bahaya narkotika ternyata masih belum dihayati benar oleh masyarakat khususnya di Indonesia. (BNN 2018)

Semakin canggihnya kemajuan teknologi komunikasi dan teknologi transportasi menjadikan transaksi peredaran narkotika semakin mudah. Transaksi dapat dilakukan melalui media sosial, sehingga penjual dan pembeli tidak perlu melakukan tatap muka yang memiliki resiko lebih mudah diketahui oleh BNN atau kepolisian. Selain itu narkotika yang diselendupkan pun dikemas dengan berbagai macam cara agar dapat mengelabui petugas keamanan. Alasan kuat yang menjadikan Indonesia mengalami krisis peredaran narkotika adalah pada kenyataannya, 60-70% narkotika yang beredar di Indonesia berasal dari luar negeri, hanya 30-40% narkotika asal lokal, utamanya ganja (BNN 2018).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, menjadikan pelabuhan laut sebagai pintu gerbang keluar masuk barang dari negara atau daerah lain, tidak terkecuali narkoba. Sekitar 80% peredaran narkoba terjadi di perairan Indonesia. Pelabuhan rakyat yang berada di pulau terluar maupun daerah perbatasan menjadi incaran para pengedar jaringan Internasional. (Laporan6.com 2018)

Saat ini kecendrungan terjadi peningkatan jumlah penyalahgunaan dan kejahatan narkoba. Begitu pula produksi narkoba yang mudah dan dapat menghasilkan uang yang banyak membuat bandar terpacu untuk memproduksi dan mengedarkannya secara membabi buta serta dengan modus operandi yang bermacam-macam. Perkembangan kejahatan atau penyalahgunaan narkoba dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat, bahkan kasus-kasus yang terungkap oleh jajaran kepolisian RI dan BNN hanyalah merupakan fenomena gunung es, yang hanya sebagian kecil saja yang tampak di permukaan sedangkan kedalamannya tidak terukur. Semuanya terjadi dikarenakan keterbatasan yang dimiliki oleh aparat penegak hukum dalam melakukan pemberantasan peredaran narkoba.

Kejahatan narkoba merupakan salah satu bentuk kejahatan tidak biasa yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir (*organization crime*) dan sudah bersifat transnasional (*transnational crime*). Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 71 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Pasal 4 Tentang BNN yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas dalam melakukan pencegahan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Kemajuan-kemajuan yang dicapai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda kita yang terperangkap pada penyalahgunaan narkoba/NAPZA (Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) baik mengkonsumsi maupun mengedarkannya. Hal itu mengisyaratkan kepada kita untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangi, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang kita harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.

Indonesia merupakan daerah transit peredaran narkoba, namun seiring perkembangan globalisasi dunia, Indonesia sudah menjadi daerah yang mudah dimasuki oleh pengedar narkoba. Pemberantasan narkoba pun sudah sering dilakukan namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak dibawah umur pun banyak yang terjerumus narkoba.

Provinsi Riau merupakan daerah yang rawan terhadap aksi penyelundupan narkoba. Garis pantai yang memanjang dari utara ke selatan Rokan Hilir hingga Indragiri Hilir melintas Dumai dan Bengkalis menjadi sasaran empuk para pengedar narkoba. Berdasarkan dari peringkat Riau terhadap penyalahguna dan hasil pemetaan yang dilakukan oleh BNN Provinsi Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tabel 1.1
Data Penyalahguna Narkoba Seindonesia 2017

No	Provinsi	Penduduk	Jumlah Penyalahguna
1	Jawa Barat	32,185,400	80.463.500
2	Jawa Timur	27,189,100	54.378.200
3	Jakarta	7,026,400	49.184.800
4	Jawa Tengah	23,376,700	44.415.700
5	Sumatera Utara	9,839,100	29.517.300
6	Banten	8,233,400	17.290.100
7	Sulawesi Selatan	6,055,602	11.505.600
8	Riau	4,787,564	10.053.900
9	Sumatera Selatan	55.535,400	8.303.100
10	Kalimantan Timur	2,512,400	7.788..400

Sumber : Published BNN 2017

Tabel 1.2
Data Kerawanan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Provinsi Riau

Kab/ Kota	Jumlah Kasus	
	2017	2018
Rohil	185	201
,Dumai	150	193
Rohul	106	130
Pekanbaru	146	233
Kampar	133	223
Kuansing	53	77
Pelalawan	71	123
Inhu	45	60
Inhil	79	86
Siak	61	115
Meranti	42	67
Bengkalis	180	262

Sumber : BNNP Riau 2019

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwasanya terjadi peningkatan terhadap kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Provinsi Riau. Data tersebut juga menunjukkan bahwasanya masih banyaknya masyarakat Riau yang masih belum memahami bahaya narkoba jika sudah berada di lingkungan mereka. Yangmana daerah Kampar, Pekanbaru dan Bengkalis merupakan daerah dengan



kasus tertinggi. Dan berdasarkan data dan hasil rapat koordinasi BNN Provinsi Riau, Riau merupakan Rangking ke-5 terbesar kasus narkoba, setelah Jakarta, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Sedangkan jalur masuk sindikat narkoba Malaysia, Riau berada di peringkat atas di pulau Sumatera karena banyaknya pintu masuk yang minim penjagaan. Untuk itu kita berharap tahun ini dan kedepannya BNN Provinsi lebih siaga untuk menekan Bandar narkoba itu sendiri, papar “Dina” selaku kepala seksi pencegahan BNNP Riau. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh BNNP yaitu melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pembentukan satgas. Kegiatan ini merupakan tindakan awal dalam mencegah peredaran narkoba. Dimana berdasarkan data kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh BNN yaitu:

Tabel 1.3
Data pelaksanaan Sosialisasi BNNP Riau tahun 2018-2019

No	Sasaran	2018	2019
1	Pelajar/ Mahasiswa	335.045	45.757
2	Instansi Pemerintah	288.837	306
3	Instansi Swasta	316.470	-
4	Kelompok Masyarakat	1.778.433	1.671.920
Total		2.718.951 orang	1.717.983 orang

Sumber :Press Release BNNP Riau T.A 2018 s/d 2019

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh BNN, BNNP Riau dan jajaran BNN kabupaten/ kota se-Riau, sepanjang 2018 ini mengungkap sebanyak 35 kasus narkoba dan mengamankan sebanyak 53 tersangka yakni 39 orang laki-laki dan 14 orang perempuan. Hal ini disampaikan kepala BNNP Riau, Brigjen Wahyu Hidayat pada Press Release akhir tahun 2018 di kantor BNNP Riau jalan pepaya, Pekanbaru. BBNP dan BNNK berhasil menyita 6.069 Gram Ganja, 19.768,4 Sabu, dan 5.012 butir jenis ekstasi. Jumlah tersebut meningkat di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



bandingkan sepanjang tahun 2017. Pada tahun 2017 BNNP Riau menyita sebanyak 628,9 gram ganja dari para pengedar, sekitar 5.184 gram sabu, dan sekitar 1635 butir pil ekstasi (BNNP Riau 2018).

Tabel I.4
Kasus Peredaran Narkoba 2017-2018

Tahun	Kasus	Tersangka	Ganja	Sabu	Ekstasi
2017	26	36	628,9 gram	5.184 gram	1.635
2018	35	53	6.069,6 gram	19.768,4 gram	5.012

Sumber: Data BNNP Riau 2018

Berdasarkan tabel di atas, dapat kita lihat bahwa pada tahun 2017 Riau menjadi peringkat nomor 8 (delapan) penyalahgunaan narkoba seIndonesia. Penyalahgunaan narkoba itu dapat terjadi karena maraknya peredaran narkoba di sekitar mereka. Hal inilah yang membuat Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau gencar mencegah dan memberantas peredaran gelap narkoba dengan mengawasi setiap sudut kota dan bekerjasama dengan berbagai instansi pemerintah yang berada di provinsi Riau untuk memberantas habis peredaran gelap narkoba. sebagaimana yang telah di atur dalam UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Presiden no 23 tahun 2010 tentang BNN. Selain itu BNN juga melakukan berbagai kegiatan seperti penyuluhan kepada masyarakat, pembentukan satgas , relawan anti narkoba, dan sosialisasi anti narkoba.

Sosialisasi merupakan salah satu dari program pencegahan yang semakin gencar dilakukan oleh BNNP Riau. Yangmana melalui kegiatan ini dapat memberikan edukasi secara langsung dan juga dapat dilakukan melalui media sosial. Dan dunia pendidikan juga menjadi sasaran utama bagi BNNP Riau untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



memberikan pemahaman akan bahaya narkoba karena sosialisasi melalui dunia pendidikan dapat menekan korban yang berasal dari kalangan pelajar maupun mahasiswa. Dan tak kalah penting, perlunya kerjasama untuk menekan peredaran narkoba.

Tabel 1.5
Data Pengguna Narkotika Yang Menjalani Rehabilitasi Rawat Jalan Diklinik Pratama BNN Provinsi Riau

Tahun	Jumlah Pengguna (Orang)		Total (Orang)
	Laki-Laki	Perempuan	
2016	147	50	197
2017	198	152	350
2018	125	31	156
2019- september	75	20	95

Sumber : BNN Provinsi Riau 2019

BNN yang merupakan instansi khusus yang di amanatkan langsung melalui peraturan presiden No.23 tahun 2010 untuk mencegah dan memberantas narkoba mengadakan peringatan hari anti narkoba internasional sebagai ajang untuk evaluasi bagi BNNP Riau, BNNK dan aparat penegak hukum terhadap kinerja selama ini. Tujuannya agar bersama-sama secara intensif dapat meningkatkan program kerja dalam hal pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul : **“Analisis Fungsi Badan Narkotika Nasional Mencegah Peredaran Narkoba Di Provinsi Riau.**

1.2 Rumusan Masalah

Melihat gejala-gejala yang ada, maka penulis ingin mengangkat permasalahan tersebut menjadi fokus utama dari kajian ini adalah :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Bagaimana fungsi Badan Narkotika Nasional mencegah peredaran narkoba di Provinsi Riau?
2. Apa hambatan Badan Narkotika Nasional mencegah peredaran narkoba di Provinsi Riau?

1.3 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disampaikan diatas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis fungsi BNN mencegah peredaran narkoba di Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan BNN mencegah peredaran narkoba di Provinsi Riau?

1.4 Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian diatas maka manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi peneliti sendiri dapat menambah wawasan dan pengetahuan, pengalaman mengenai fungsi dan badan narkotika nasional mencegah peredaran narkoba.
2. Bagi peneliti, adanya penelitian ini menjadi wadah untuk menuangkan ilmu pengetahuan yang selama ini penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Penelitian ini berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat betapa maraknya peredaran narkoba di indonesia terkhususnya di Provnsi Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. Menambah daftar kepustakaan Universitas dan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial serta juga dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian yang sejenis.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisikan bab demi bab dalam laporan penelitian yang terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini membahas dan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan tentang teori-teori yang berhubungan dengan pembahasan yang akan peneliti lakukan.

BAB III: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini dikemukakan metodologi penelitian yang meliputi lokasi dan waktu penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel serta analisis data.

BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan tentang objek yang akan diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti lokasi, karakter, dan demografi.

BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

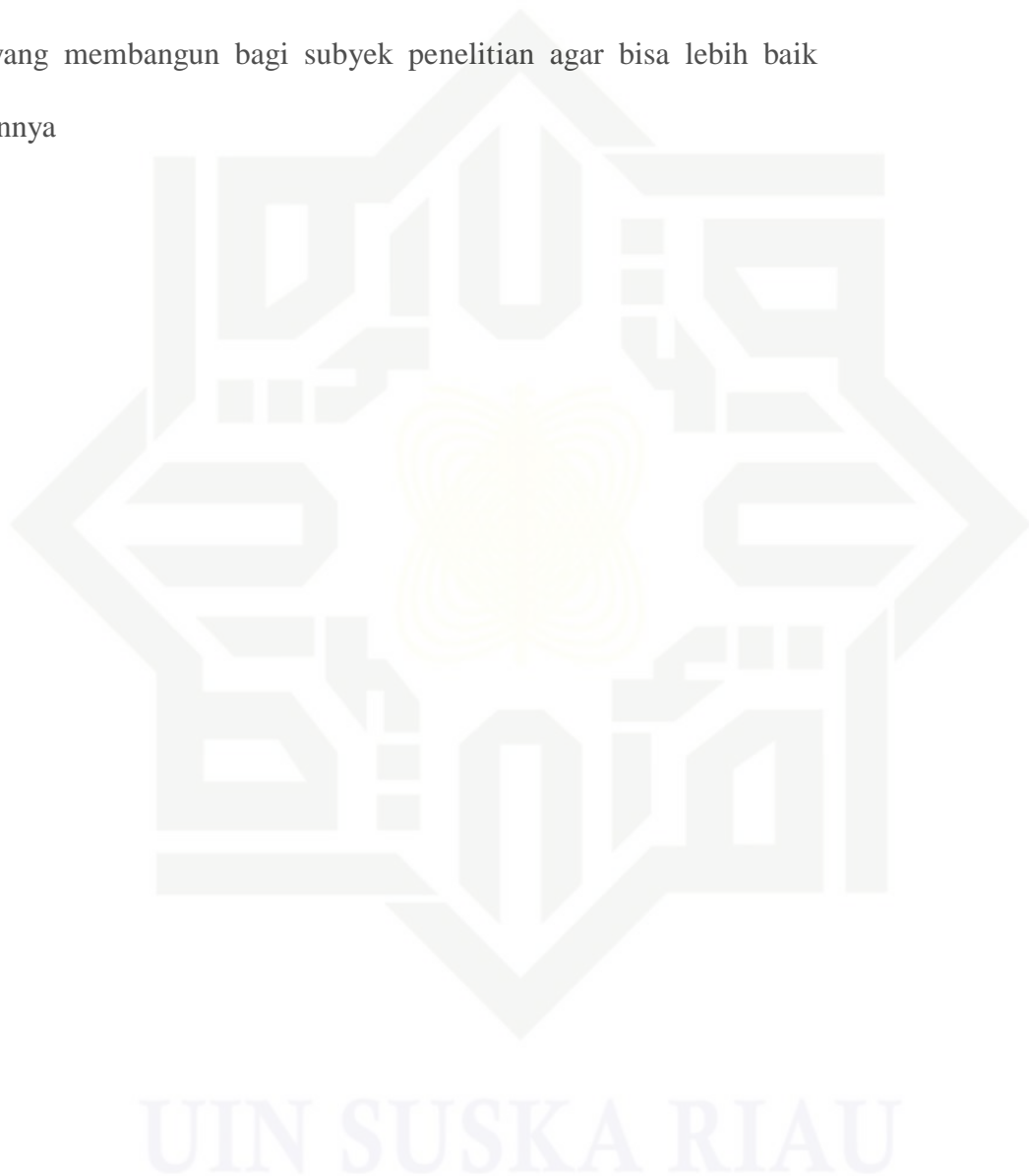
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini berisi hasil pengelolaan data di lapangan hasil penelitian dilapangan serta wawancara tentang Fungsi BNN Mencegah Peredaran Narkoba di Provinsi Riau

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian serta kritik dan saran yang membangun bagi subyek penelitian agar bisa lebih baik kedepannya





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Badan Narkotika Nasional

BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang profesional yang bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan presiden RI No. 23 Tahun 2010 tentang BNN dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional No. PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota. BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

2.2 Kebijakan Publik

Nugroho, Riant (2004: 1-7) mengatakan kebijakan publik dalam kepustakaan Internasional disebut sebagai public policy, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus di taati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama di pandang perlu untuk diatur, maka formulasi isu tersebut menjadikan kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta di sepakati oleh para pejabat yang berwenang.

Sementara itu pakar kebijakan publik Thomas Dye, dalam Riant Nugroho (2011:204) mendefenisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Untuk melahirkan sebuah produk kebijakan, dapat pula memahami konsepsi kebijakan menurut Abdul Wahab yang dipertegas oleh Budiman Rusli (2000:51-52) dimana lebih jauh menjelaskan sebagai berikut :

1. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan. Paling tidak ada tiga perbedaan mendasar antara kebijakan dengan keputusan yakni:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

- a. Ruang lingkup kebijakan jauh lebih besar dari pada keputusan
 - b. Pemahaman terhadap kebijakan yang lebih besar memerlukan penelaahan yang mendalam terhadap keputusan.
 - c. Kebijakan biasanya mencakup upaya penelusuran interaksi yang berlangsung diantara begitu banyak individu, kelompok dan organisasi.
2. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Perbedaan antara kebijakan dengan administrasi mencerminkan pandangan klasik. Pandangan klasik tersebut kini banyak dikritik, karena model pembuatan kebijakan dari atas misalnya, semakin lama semakin tidak lazim dalam praktik pemerintahan sehari-hari. Pada kenyataannya, model pembuatan kebijakan yang memadukan antara *top-down* dengan *bottom-up* menjadi pilihan yang banyak mendapat perhatian dan pertimbangan yang realistis.
 3. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari Administrasi. Langkah pertama dalam menganalisis perkembangan kebijakan negara ialah perumusan apa yang sebenarnya diharapkan oleh para pembuat kebijakan. Pada kenyataannya cukup sulit mencocokkan antara perilaku yang senyatanya dengan harapan para pembuat keputusan.
 4. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan. Perilaku kebijakan mencakup pula kegagalan melakukan tindakan yang tidak disengaja, serta keputusan untuk tidak berbuat yang disengaja (*deliberate decisions not to act*). Ketidadaan keputusan tersebut meliputi juga keadaan dimana seseorang atau sekelompok orang yang secara sadar atau tidak sadar,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengaja atau tidak sengaja menciptakan atau memperkokoh kendala agar konflik kebijakan tidak pernah tersingkap di mata publik.

5. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai, yang mungkin sudah dapat diantisipasi sebelumnya atau mungkin belum dapat diantisipasi. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengertian kebijakan perlu pula kiranya meneliti dengan cermat baik hasil yang diharapkan ataupun hasil yang senyatanya dicapai. Hal ini dikarenakan, upaya analisis kebijakan yang sama sekali mengabaikan hasil yang tidak diharapkan (*unintended results*) jelas tidak akan dapat menggambarkan praktik kebijakan yang sebenarnya.
6. Kebijakan kebanyakan didefinisikan dengan memasukkan perlunya setiap kebijakan melalui tujuan atau sasaran tertentu baik secara eksplisit atau implisit. Umumnya, dalam suatu kebijakan sudah termaktub tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan jauh hari sebelumnya, walaupun tujuan dari suatu kebijakan itu dalam praktiknya mungkin saja berubah atau dilupakan paling tidak secara sebagian.
7. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu. Kebijakan itu sifatnya dinamis, bukan statis. Artinya setelah kebijakan tertentu dirumuskan, diadopsi, lalu diimplementasikan, akan memunculkan umpan balik dan seterusnya.
8. Kebijakan meliputi baik hubungan yang bersifat antar organisasi ataupun yang bersifat intra organisasi. Pernyataan ini memperjelas perbedaan antara keputusan dan kebijakan, dalam arti bahwa keputusan mungkin hanya



ditetapkan oleh dan dan melibatkan suatu organisasi, tetapi kebijakan biasanya melibatkan berbagai macam aktor dan organisasi yang setiap harus bekerja sama dalam suatu hubungan yang kompleks.

9. Kebijakan negara menyangkut peran kunci dari lembaga pemerintah, walaupun tidak secara eksklusif. Terhadap kekaburan antara sektor publik dengan sektor swasta, disini perlu ditegaskan bahwa sepanjang kebijakan itu pada saat perumusannya diproses, atau setidaknya disahkan atau diratifikasikan oleh lembaga-lembaga pemerintah, maka kebijakan tersebut disebut kebijakan negara.
10. Kebijakan dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif. Hal ini berarti pengertian yang termaktud dalam istilah kebijakan seperti proses kebijakan, aktor kebijakan, tujuan kebijakan serta hasil akhir suatu kebijakan dipahami secara berbeda oleh orang yang menilainya, sehingga mungkin saja bagi sementara pihak ada perbedaan penafsiran mengenai misalnya tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kebijakan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut
11. Tujuan kebijakan publik membentuk keseimbangan dalam kehidupan masyarakat, sebagai penyeimbang maka kebijakan dituntut harus memberikan rasa adil inilah yang sangat jarang dapat diberikan di indonesia karena rasa adil ini merupakan suatu yang sangat mahal bagi masyarakat. Dengan memberikan cita rasa hukum pada masyarakat merupakan salah satu cara agar masyarakat merasa tenang dan damai dalam menyelami arti bernegara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persoalan yang ada dimasyarakat kebijakan publik memiliki manfaat untuk menjelaskan berbagai fenomena kehidupan masyarakat secara lebih rasional dan legal. Dalam pembuatan kebijakan berbagai proses pemanfaat sumber daya yang ada di dalam negara perlu menjadi perhatian karena pemanfaatan ini biasanya yang menjadi peran penting dalam kondisi suatu bangsa. Proses pemanfaatan ini biasanya yang menjadi peranan penting dalam kondisi suatu bangsa. Proses pemanfaatan kebijakan publik untuk berbagai aktivitas sosial, politik, ekonomi, budaya, seni, teknologi, dan sebagainya adalah mengolah sumber-sumber yang berguna untuk kepentingan bangsa dan negara. Berbagai kemungkinan dalam mencapai pemanfaatan yang efektif, efisien dan ekonomis perlu dilakukan secara kemprehensif, karena tidak jarang diindonesia kebijakan hanya di rumuskan hanya untuk menyenangkan sebagian pihak, dan tidak jarang kebijakan dimanfaatkan untuk kepentingan elitis.

Kebijakan publik dibuat untuk memecahkan masalah dan untuk mencapai tujuan serta sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah berupa tindakan-tindakan pemerintah. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu, yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat.

2.3 Fungsi Badan Narkotika Nasional

Pasal 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang BNN diatur bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BNN menyelenggarakan fungsi:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakna teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Pengoordinasian instansi pemerintah terkait maupun komponen masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol di tingkat pusat dan daerah.
13. Pengkoordinasian peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.
14. Peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta pemberian bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

17. Pelaksanaan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan P4GN di lingkungan BNN.
18. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN.
19. Pelaksanaan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
20. Pelaksanaan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, serta pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
21. Pelaksanaan pengujian narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
22. Pengembangan laboratorium uji narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif tembakau dan alkohol.
23. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika)

2.4 Narkotika

Secara etimologis narkoba atau narkotika berasal dari bahasa Inggris *narcose* atau *narcosis* yang berarti menidurkan dan pembiusan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu *narke* atau *narkam* yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Narkotika berasal dari perkataan *narcotic* yang artinya sesuatu yang dapat menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan efek *stupor* (bengong), bahan-bahan pembius dan obat bius. Kamus Besar Bahasa Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengistilahkan narkoba atau narkotika adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau merangsang.

Narkoba adalah singkatan dari Narkotika dan Obat/Bahan Berbahaya, selain narkoba, istilah lain yang memperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Semua Istilah ini, baik Narkoba atau Napza, mengacu pada sekelompok zat yang umumnya mempunyai resiko kecanduan bagi penggunaanya. Menurut pakar kesehatan narkoba sebenarnya adalah psikotropika yang biasa dipakai untuk membius pasien saat hendak dioperasi atau obat-obatan untuk penyakit tertentu. Namun kini persepsi itu disalahgunakan akibat pemakaian yang telah diluar batas dosis. (<https://bnn.go.id>)

Narkotika merupakan zat sintetis maupun semi sintetis yang dihasilkan tanaman atau lainnya yang berdampak pada penurunan atau perubahan kesadaran dan hilangnya rasa nyeri. Zat ini dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaanya. Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 mengenai Narkotika pada Lampiran I, pemerintah membagi narkotika ke dalam beberapa golongan yaitu:

1. Golongan I

Narkotika golongan I yaitu narkotika yang hanya dapat digunakan dengantujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

- a. Tanaman *Papaver somniferum* L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Opium mentah yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan morfinnya.
- c. Opium masak terdiri dari:
 - 1) Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan
 - 2) Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu di campur dengan daun atau bahan lain
 - 3) Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing
- d. Tanaman Koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
- e. Daun Koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
- f. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
- g. Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Dll.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Golongan II

Narkotika Golongan II berkhasiat sebagai pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan sebagai terapi/ bertujuan pengembangan ilpeng serta mempunyai potensi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika golongan II ini terdiri dari Alfasetilmetadol , Alfameprodina, Morfin, etobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya.

3. Golongan III

Narkotika golongan III merupakan narkotika yang mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Narkotika ini terdiri dari Asetildihidrokodeina Dekstropoksifena, Dihidrokodeina, Etilmorfina, Kodeina, Nikodikodina, dan Nikokodina. (UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika)

2.5 Tindakan Pencegahan Peredaran

Untuk melakukan tindakan pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba pertama-tama harus dimulai dari internal keluarga. Masyarakat harus berupaya untuk mendidik atau mengawasi putra-putrinya agar tidak terlibat perkara narkoba. Mendidik dalam arti selalu mengingatkan putra-putrinya supaya selalu waspada terhadap ajakan pengedar narkoba, termasuk mengajarkan tentang nilai-nilai agama dan sosial kemasyarakatan. disamping itu juga memberikan ruang konsultasi antara anak dan orang tua terhadap permasalahan yang dihadapinya, dan tentunya menjalin keakraban dan keharmonisan di dalam keluarga. (Parasian Simajuntak 2011: 190-192)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun diluar keluarga menjalin kerjasama untuk saling mengingatkan dan membentuk kelompok anti narkoba, baik dilingkungan paling kecil RT/RW, kelurahan, kecamatan, kabupaten bahkan sampai tingkat provinsi atau masuk dalam lembaga/ organisasi yang konsen terhadap permasalahan penyalahgunaan narkoba. Misalnya masuk organisasi Gerakan Nasional Peduli Anti Narkoba dan Tawuran (GEPENTA) yang sering mengadakan kegiatan-kegiatan penyuluhan, ceramah, seminar tentang bahaya narkoba agar masyarakat luas yang belum terkontaminasi penyalahgunaan narkoba bersedia dengan tekad menjauhkan diri, keluarga dan lingkungan dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

Dengan demikian jika mengacu kepada pasal 104, 105, 106, dan 107 UU No. 35 tahun 2009 maka masyarakat memiliki hak untuk memberikan informasi atau laporan kepada pihak berwenang jika terjadi penyalahgunaan narkoba, baik dalam keluarga ataupun dilingkungan masyarakat.

Keterlibatan institusi pemerintahan seperti polri selaku penegak hukum, pembimbing dan pengayom masyarakat serta menjamin keamanan dalam negeri harus dapat menegakkan hukum, membina masyarakat untuk mencegah keterlibatan warga masyarakat dalam penyalahgunaan narkoba dan tidak mau diajak kompromi oleh bandar atau pengedar narkoba. Begitu juga dengan TNI yang menjamin kedaulatan negara berkewajiban dan bertanggung jawab tetap tegaknya negara kesatuan republik indonesia (NKRI) dan tetap menegakkan kedaulatan negara. Kewajibannya dalam bermasyarakat menjauhkan diri dari keterlibatan perkara narkoba dan tentunya tidak terlibat dalam penggunaan



narkoba. Bersatu dengan institusi negara melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba.

2.6 Interaksi Sosial

Menurut Setiadi (2011:63) interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis berkaitan dengan orang perorangan, kelompok perkelompok, maupun perorangan terhadap perkelompok ataupun sebaliknya. Sedangkan menurut Soekanto (2010: 55) interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok.

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengertian interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok.

2.7 Penyakit Masyarakat

Menurut Kartini (1992: 4) penyakit sosial atau penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang dianggap tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa di integrasikan dalam pola tingkah laku umum. Perbuatan yang termasuk dalam penyakit masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara dalam penjelasan pasal 15 ayat (1) huruf c yang berbunyi “mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat”, yang dimaksud dengan penyakit masyarakat antara lain pengemis dan pergelandangan, pelacuran, perjudian, penyalahgunaan obat dan narkotika, pemabukan, perdagangan manusia, penghisapan/ praktik lintah darat, dan pungutan liar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.8 Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelusuran penelitian terhadap penelitian terdahulu, dari beberapa judul yang ada penulis kemudian mengambil beberapa penelitian yang berkaitan dengan konteks penelitian. Yangmana penelitian tersebut adalah:

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Isnayati Novita, Muhammad Noor, Dini Zulviani	Pencegahan Penanggulangan Narkoba Oleh Badan Narkotika Nasional Kota Samarinda (jurnal 2018)	Pencegahan dan penanggulangan narkoba oleh badan narkotika nasional kota samarinda sudah berjalan baik yang mana dapat dilihat dari program kerja badan narotika nasional kota samarinda dan strategi-strategi yang diatur oleh masing-masing seksi yang memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang bahaya dan efek dari narkoba melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan	Pada penelitian ini cenderung membahas program pencegahan penanggulangan narkoba secara umum dan hanya menjelaskan secara garis besar apa saja program-program badan narkotika nasional kota samarinda
2	Siti Maisaroh	Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba Di Provinsi Riau (Skripsi 2017)	Peran badan narkotika nasional provinsi riau dalam menjalankan programnya berjalan dengan baik dalam rangka pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN), yang mana kegiatan pencegahan melalui program-program penyuluhan sosialisasi bahaya narkoba, pemberdayaan masyarakat dan peran serta masyarakat. Serta	Dalam penelitian ini lebih menjelaskan bagaimana pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			program pemberantasan narkoba seperti pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan kejahatan narkoba serta pemurusan jaringan kejahatan narkoba.	
3.	Tri Wulandari	Implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada kalangan pelajar di BNNP DIY (jurnal 2016)	Implementasi kebijakan P4GN di BNNP DIY meliputi tahap interpretasi, pengorganisasian dan aplikasi yaitu dengan menyusun rencana strategi dan rencana kerja anggaran. Yang mana hasil dari implementasi ini adalah bertambahnya peserta yang mendapatkan sosialisasi, terbentuknya kader anti narkoba, dan sekolah yang membuat program upaya P4GN.	Jurnal ini lebih fokus membahas bagaimana proses pelaksanaan kebijakan dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap yang sasaran utamanya adalah kalangan pelajar
4	Bayu Puji Haryanto	Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba di Indonesia	Penyalahgunaan narkoba masih menjadi masalah kronis yang menimpa indonesia, kasus peredaran sabu dan banyak tertangkapnya bandar-bandar narkoba internasional dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti bahwa indonesia sedang berada dalam kondisi darurat narkoba. Adapun pencegahan dan pemberantasan narkoba dilakukan dengan tiga tahapan yaitu premetif, preventif dan represif.	Dalam jurnal ini lebih fokus menjelaskan dan menjabarkan pengertian dari upaya-upaya pencegahan peredaran narkoba



2.9 Pandangan Islam Tentang Narkoba

Pada dasarnya kata Narkotika tidak tercantum dalam alquran maupun hadist, namun narkotika ini di kaitkan dengan kata khamar karna sama-sama ada dampak yang ditimbulkannya yaitu sifat memabukkan dalam hukum islam dikenal dengan adanya sumber-sumber hukum islam, dan salah satu sumber hukum islam itu yaitu dengan menggunakan metode kias atau bisa disebut juga dengan analogi hukum. Kias adalah menganalogikan suatu masalah yang belum ada ketetapan hukumnya (nash/dalil) dengan masalah yang sudah ada ketetapan hukumnya karna adanya persamaan. Sifat maupun bahaya yang ditimbulkan oleh penyalagunaan narkotika bahkan lebih dasyat dari minuman keras atau khamar, maka ayat alquran yang melarang atau mengharamkan minuman keras atau khamar dapat dijadikan dasar atau dalil terhadap dilarang dan diharamkannya penyalagunaan narkotika. Berikut ayat-ayat alquran yang mengharamkan :

Q.S Al-Baqarah/2:219

﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (*Al-Qur'andan Terjemah*, 2009 h.34)

Kaum Muslimin bertanya kepadamu wahai Nabi, tentang hukum memanfaatkan khamar (minuman keras) untuk dikomsumsi dan diperjualbelikan.

Khamar adalah semua apa saja yang memabukkan lagi menghilangkan dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

menutup akal, baik berupa makanan ataupun minuman, dan mereka bertanya kepadamu tentang hukum judi, yaitu mengambil harta atau menyerahkannya dengan sadar perjudian, satu bentuk taruhan dari kedua belah pihak katakanlah kepada mereka, pada keduanya terdapat banyak kerusakan yang ditimbulkan terhadap agama, dunia, akal, dan harta. Dan pada keduanya terdapat beberapa manfaat bagi manusia dari sisi perolehan harta dan lainnya, namun dosa akibat keduanya lebih besar daripada aspek kemanfaatannya. (Shalih bin Muhammad :102-103). Dari hadis di atas menjelaskan bahwa segala sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran maka dilarang untuk di konsumsi, baik dalam jumlah kecil maupun besar.

Selain Al-quran hadist juga merupakan sumber hukum islam, hadist adalah perkataan yang bersumber dari nabi Muhammad S.a.w. adapun hadist yang mengharamkan Khamar yakni:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَشْكِرْفُهُو حَرَامٌ
(رواه البخاري)

Artinya: “Dari aisyah r.a., katanya nabi: Rasullah saw. Pernah ditanya tentang sebangsa minuman keras yang terbuat dari madu, bernama bit’i beliau berkata: “setiap minuman yang memabukkan haram (H.R Al-Bukhori)”.

Hadits diatas merupakan salah satu hadits yang melarang untuk mengkonsumsi khamar walaupun hadist diatas tidak mengaskan bahwa narkoba adalah khamar tetapi unsur narkoba sama dengan khamar yang dapat menghilangkan kesadaran (mabuk) ketika dikonsumsi.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu pula kita dapat menyampaikan tentang ayat-ayat al-qur'an yang mana berisi tentang pujian allha kepada manusia agar lebih memahami keberadaan dirinya sebagai khalifah di atas bumi ini dan sebagai umat yang terbaik diciptakan oleh Allah SWT. Dalam Al-Qur'an Surah Ali-Imran/ 4:110 sebagai berikut:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

Artinya: *Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik (QS: Ali Imran/3:110)*

Di dalam ayat lain Allah SWT berfirman :

وَلَتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

Artinya : *Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru (berbuat) yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS: Ali-Imran/3:104)*

Demikian pula yang disampaikan dalam surah An-Nahl/ 16: 125 Allah SWT:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجِدِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ١٢٥

Artinya: *“Serulah (manusia) kepada jalan tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang lebih baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik..”*

Dari ayat di atas menunjukan bahwa betapa pentingnya kepedulian setiap orang kelompok atau golongan untuk senantiasa melaksanakan tugas



mengingatkan dan mengajak kepada setiap orang untuk berbuat baik dan mencegah mereka dari perbuatan yang tidak baik dan melanggar hukum, termasuk di dalamnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Dalam melaksanakan misi tersebut hendaklah dilakukan dengan cara dan metode yang baik sehingga mampu menarik masyarakat dan akan membawa keberhasilan.

Maka dapat disimpulkan bahwa minuman keras yang mengandung alkohol dan memabukkan termasuk kedalam narkoba, yang mana dalam ajaran islam dilarang karena berbahaya dan merusak, baik kepada jasmani maupun rohani manusia dan akan menyeret seseorang kedalam neraka karena setiap yang di larang hukumnya adalah haram.

2.10 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang dikemukakan diatas masih bersifat abstrak maka agar tercapainya satu kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan peneliti maka di masukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Narkoba, sebagaimana dituliskan pada UU No. 35 tahun 2009 tentang Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dan segala sesuatu yang dapat menghilangkan kesadaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pencegahan diartikan sebagai upaya yang dilakukan secara sadar oleh individu maupun kelompok agar tidak memakai narkoba atau berhenti memakai narkoba.
3. BNN adalah lembaga pemerintah non kementerian yang professional yang bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya.
4. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu maupun dengan kelompok.
5. Penyakit masyarakat adalah segala bentuk tingkah laku yang tidak sesuai, melanggar norma-norma umum, adat-istiadat, hukum formal atau tidak bisa di integrasikan dalam pola tingkah laku umum

2.11 Konsep Operasional

Tabel 2.1 Indikator Penelitian

Referensi Fungsi badan narkotika nasional (BNN)	Indikator	Sub indikator
	1. Program pencegahan	a. Sosialisasi anti narkoba b. Pembentukan Relawan Anti Narkoba c. Penyuluhan
	2. Kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba	a. Kepolisian b. Lembaga pendidikan c. Pemerintah dan Swasta d. Masyarakat

Sumber : Peraturan Presiden No 23 Tahun 2010

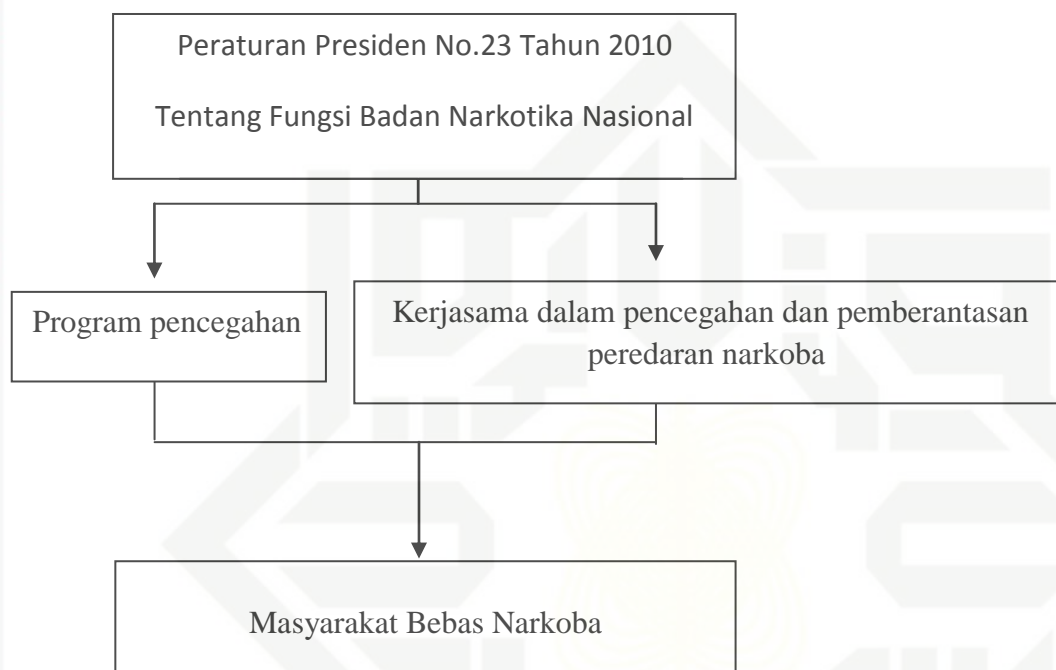
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.12 Kerangka Pemikiran

Kerangka penelitian “Analisis Fungsi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Peredaran Narkoba di Provinsi Riau”.

Tabel 2.2 Kerangka Penelitian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah dengan mencari data suatu masalah, diperlukan suatu metode yang bersifat ilmiah yaitu metode penelitian yang sesuai dengan yang akan diteliti. Suatu metode merumuskan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Jadi suatu metode dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan keserasian dengan obyeknya serta metode yang digunakan sejalan dengan tujuan, sasaran, variabel, dan masalah yang hendak diteliti. Sedangkan metode penelitian menguraikan secara teknik apa yang digunakan dalam penelitiannya.

3.1 Jenis Penelitian

Dasar penelitian yang di gunakan adalah deskriptif kualitatif yang merupakan penelitian yang memberikan gambaran atau penjabaran dari data-data yang di peroleh berdasarkan wawancara secara lisan dari narasumber dan pengamatan perilaku seseorang. Dalam penelitian ini peneliti hanya menguraikan dan menjelaskan fungsi BNN dalam rangka mencegah dan memberantas peredaran narkoba di Provinsi Riau tanpa menghubungkan dengan unsur-unsur lain.

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian merupakan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dengan alamat Jl. Pepaya No, 65, Pekanbaru.



Kegiatan penelitian dilakukan kurang lebih 6 bulan dari bulan Oktober 2019 sampai dengan Maret 2020. Secara terperinci jadwal kegiatan penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.1 Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Tahun 2019-2020						
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr
1.	pengajuan judul							
2.	Penyusunan proposal							
3.	Seminar proposal dan revisi							
4.	Ijin penelitian							
5.	Mengumpulkan data							
6.	Penyusunan skripsi							

3.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini peneliti mengambil dua sumber data yaitu :

3.3.1 Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dari narasumber yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Data primer yang diperoleh dari informan yang menjadi subjek penelitian, berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian, baik melalui observasi maupun wawancara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder merupakan pelengkap atau penunjang data primer dikumpulkan dari data yang sesuai. Data sekunder ini meliputi dokumentasi berupa rekaman suara dan foto-foto sebagai bukti penelitian ini benar dilakukan. Data sekunder yang peneliti dapatkan berupa data, tabel, gambar dan dokumentasi.

3.4 Metode Pengumpulan data

Untuk memperoleh data dan informasi dan keterangan-keterangan yang dilakukan, perlu menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut (Sugiyono, 2011:157-162):

3.4.1 Wawancara

Yaitu dengan memberikan pertanyaan langsung kepada sejumlah pihak yang terkait dengan masalah penelitian. Dalam metode ini akan digunakan metode wawancara dengan orang-orang yang berkompeten dibidang-bidang yang ingin di teliti.

3.4.2 Observasi

Yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung kepada sejumlah acuan yang berkenan dengan topik penelitian dengan lokasi penelitian. Dalam metode ini akan menggunakan pengamatan langsung terhadap suatu benda, kondisi, proses atau perilaku.

3.4.3 Dokumentasi

Yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan buku yang akurat dari pencatatan



sumber-sumber informasi khusus dari kerangka/tulisan, wasiat, buku, undang-undang, foto, dan lainnya.

3.5 Informan Penelitian

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi kepada peneliti. Adapun informan penelitian ini adalah dapat di lihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.2 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	KETERANGAN
1	Kepala Bidang Pemberantasan	1
2	Kepala Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat	1
3	Kasi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat	2
4	Pegawai Pencegahan Dan Pemberdayaan Masyarakat	2
5	Kassubag Administrasi	1
6	Masyarakat	3
Jumlah		10

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan yang paling mengetahui bagaimana langkah-langkah BNN dalam menanggulangi peredaran narkoba di Provinsi Riau.

3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan, penyajian, interpretasi dan analisis data yang diperoleh dari lapangan dengan tujuan agar data yang disajikan mempunyai makna, sehingga pembaca dapat mengetahui hasil penelitian.

Bogdan menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya



dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2014:244).

Metode ini menggunakan metode kualitatif, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif yaitu analisis data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, mengelola data kemudian menyajikan data observasi agar pihak lain dapat mudah memperoleh gambaran mengenai objek yang diteliti.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Hal yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa saja yang akan terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Concluding Drawing Verivication*)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Badan Narkotika Nasional

Badan narkotika nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah di bidang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap Psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol. Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam peraturan kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal, BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah provinsi. BNNP berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BNN.

4.2 Profil Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

4.2.1 Sejarah Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau adalah lembaga pemerintah non kementerian yang professional yang bergerak di bidang Pencegahan dan Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Bahan-Bahan Adiktif lainnya yang disebutkan dalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Perpres RI No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional dan Peraturan Kepala BNN No. PER/04/V/BNN/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi (BNNP) dan BNN Kabupaten/Kota. BNN Provinsi Riau memiliki tugas, fungsi dan wewenang di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), yang



bertujuan meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Secara singkat, sebelum divertikalisasi, BNP Riau dibentuk oleh Gubernur Riau pada Desember 2004. Saat itu ketuanya adalah wakil Gubri Drs. H. Wan Abu Bakar. Namun, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh Kepala Pelaksanaan Harian yang mana dilantik pertama kalinya pada April 2005. Pada masa itu, anggaran BNP Riau dibebankan pada dana hibah dari APBD Provinsi Riau. Pada April 2011 Badan Narkotika Provinsi Riau menjadi instansi vertikal dan berubah nama menjadi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau. Dengan demikian, anggaran BNNP/ BNNK dibebankan pada APBN. Anggaran turun pertama kali pada bulan Oktober 2011 yang ditujukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana. Sementara untuk anggaran program kegiatan turun di tahun berikutnya yakni tahun 2012. Dari 2 (dua) kota dan 10 (sepuluh) kabupaten yang ada di Provinsi Riau, baru 2 yang telah divertikalisasi menjadi BNN kab/kota yaitu:

1. BNNK Pekanbaru yang divertikalisasi pada Juni 2011.
2. BNNK Kuansing yang divertikalisasi pada September 2013.

Di tahun 2015 BNN RI akan mengajukan 70 kabupaten/kota se-Indonesia untuk divertikalisasi yang salah satunya adalah Kabupaten Pelalawan. Dan pada saat ini BNN Provinsi Riau memiliki tiga tempat rehabilitasi yaitu:

1. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan Pekanbaru (rawat inap kurang lebih 30 pasien)
2. Badan Narkotika Kabupaten Kampar (rawat inap kurang lebih 60 pasien)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Klinik Pratama BNN Provinsi Riau (rawat jalan)

4.2.2 Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Visi

“Menjadi perwakilan BNN di Provinsi Riau yang professional dan mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).”

Misi

“Bersama komponen masyarakat, Instansi Pemerintah terkait dan Instansi Swasta di Riau melaksanakan Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberantasan, Rehabilitasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Bahan Adiktif.”

4.3 Tujuan Badan Narkoba Nasional Provinsi Riau

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa secara umum tujuan dari BNNP Riau adalah untuk meningkatkan daya tangkal (imunitas) masyarakat guna mewujudkan masyarakat Provinsi Riau bersih dari penyalahgunaan dan langka dari peredaran gelap Narkoba. Tujuan tersebut telah ditetapkan dalam sasaran strategis Renstra BNN tahun 2010-2014. Renstra BNN tahun 2010-2014 menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan BNN Provinsi Riau yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja di lingkungan BNN Provinsi Riau.



4.4 Uraian kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau

Program yang telah ditetapkan oleh BNN yang akan dilaksanakan oleh BNN Provinsi yaitu “Program Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”. Berdasarkan program tersebut, ditetapkan pula kegiatan yang menjadi prioritas pada BNN Provinsi, yaitu **“Fungsi Badan Narkotika**

Pencapaian indikator kinerja utama tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang berada dalam lingkup Program P4GN/Program Teknis. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:

1. Wahana Diseminasi Informasi P4GN.
2. Instansi Pemerintah di daerah yang diadvokasi bidang P4GN.
3. Instansi Swasta yang diadvokasi bidang P4GN.
4. Kader Anti Narkoba yang terbentuk.
5. Lembaga Pendidikan yang diberdayakan bidang P4GN.
6. Lingkungan Kerja yang diberdayakan bidang P4GN.
7. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah perkotaan yang diberdayakan alternative.
8. Lokasi (lingkungan masyarakat) di daerah pedesaan yang diberdayakan alternative.
9. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang melapor di IPWL BNNP.
10. Penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang dijangkau layanan terapi dan rehabilitasi.
11. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan (LKN).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

12. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21).
13. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan Narkoba yang diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21).
14. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.
15. Layanan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BNNP yang dilaksanakan.
16. Layanan Perkantoran.

Komponen kegiatan yang dilaksanakan oleh BNNP Riau dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program dan kegiatan tersebut antara lain, :

1. Komponen Kegiatan Bidang Pencegahan
 - a. Pementasan Pagelaran Seni Budaya P4GN
 - b. Expo Budaya.
 - c. Ikrar Bujang Dara Anti Narkoba.
 - d. Talk Show P4GN di Radio dan TV Lokal.
 - e. *Forum Group Discussion* (FGD) Tentang P4GN.
2. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011 di Lingkungan BNNP Riau.
 - a. Pelaksanaan Advokasi tentang Implementasi Inpres No. 12 tahun 2011 di lingkungan Instansi Swasta di Daerah.
 - b. Pembentukan Kader Anti Narkoba.
 - c. Komponen Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - d. Peran serta siswa dan mahasiswa dalam ciptakan Kampus dan Sekolah bebas Narkoba.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peran serta pekerja dalam ciptakan lingkungan kerja bebas Narkoba.
 - a. Lingkungan Masyarakat di daerah perkotaan yang diberdayakan alternatif.
 - b. Pengantaran penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba ke tempat rehabilitasi.
 - c. Pelaksanaan Pendampingan pascarehabilitasi terhadap penyalahguna dan/atau pecandu Narkoba.
4. Komponen Kegiatan Bidang Pemberantasan
 - a. Laporan Kasus Narkoba Hasil Pemetaan.
 - b. Berkas Perkara Kasus Kejahatan Narkoba yang diselesaikan (P.21).
 - c. Berkas Penyidikan aset tersangka tindak kejahatan narkoba yang diselesaikan dan diajukan ke tahap penuntutan (P.21).
5. Komponen Kegiatan Bagian Tata Usaha
 - a. Dokumen Akuntabilitas Kinerja Unit Kerja.
 - b. Layanan Dukungan Manajemen Operasional Unit Kerja.
 - c. Layanan Perkantoran.

4.5 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan anarkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota bahwa Adapun tugas pokok dan fungsi setiap bidang yaitu:

1. Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat (P2M)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan desiminasi informasi dan advokasi P4GN di bidang pencegahan dalam wilayah Provinsi;
- c. penyiapan pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternative P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- d. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi; dan
- e. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pencegahan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Provinsi.

2. Bidang Berantas

Bidang pemberantasan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi. Dalam melaksanakan tugas , bidang Pemberantasan menyelenggarakan fungsi:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah provinsi;
 - b. penyiapan pelaksanaan pemberantasan dan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dalam wilayah Provinsi;
 - c. penyiapan pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan intelejen teknologi dan intelijen taktis, operasional dan produk dalam rangka P4GN di bidang Pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
 - d. penyiapan pelaksanaan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba, Psikotropika, precursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol dalam wilayah Provinsi;
 - e. penyiapan pelaksanaan administrasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana narkoba dalam wilayah Provinsi;
 - f. penyiapan pelaksanaan pengawasan distribusi precursor sampai pada pengguna akhir dalam wilayah Provinsi;
 - g. penyiapan pelaksanaan pengawasan tahanan dan barang bukti dalam wilayah Provinsi;
 - h. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di bidang pemberantasan kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;
- dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang pemberantasan dalam wilayah Provinsi.

3. Bidang Rehabilitasi

Bidang rehabilitasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, bidang rehabilitasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, dan rencana kerja tahunan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi;
- b. penyiapan pelaksanaan asesmen penyalah guna dan/atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- c. penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan Lembaga rehabilitasi media dan rehabilitasi social penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- d. penyiapan pelaksanaan peningkatan kemampuan layanan pascarehabilitasi dan pemdampingan bagi mantan penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- e. penyiapan dan pelaksanaan penyatuan Kembali kedalam masyarakat dan perawatan lanjut bagi mantan penyalah guna dan/ atau pecandu narkoba dalam wilayah Provinsi;
- f. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis dan supervise P4GN di bidang rehabilitasi kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi; dan



- g. penyiapan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan P4GN di bidang rehabilitasi dalam wilayah Provinsi.

4.6 Kondisi Saat Ini

BNNP Riau dalam pelaksanaan tugasnya, memerlukan hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas tersebut sehingga visi dan misi dapat tercapai. Namun pada kenyataannya, kondisi BNN Provinsi Riau saat ini dapat dikatakan masih kurang memadai untuk dapat mencapai kinerja yang optimal. Baik itu dari segi personil maupun sarana dan prasarana. Jumlah PNS/POLRI serta tenaga Honorer yang ada saat ini 70 orang dari total kebutuhan tenaga struktural dan staf berdasarkan Daftar Susunan Pegawai (DSP) BNN RI. Dimana berdasarkan DSP BNN RI pegawai BNNP Riau adalah 211 (dua ratus sebelas) orang pegawai dengan rincian 1 (satu) orang Kepala BNNP Riau, 1 (satu) orang Kabag Tata Usaha, 3 (tiga) orang Kabid (Esselon III) , 10 (sepuluh) orang Kasi (Esselon IV) dan 181 (Seratus delapan puluh satu) orang staf/ pelaksana.

Selain itu, beberapa kendala lain yang dihadapi oleh BNNP Riau adalah sebagai berikut:

- a. Gedung kantor BNN Provinsi Riau hingga saat ini masih dalam status pinjaman dari Pemprov Riau.
- b. Kondisi gedung kantor juga kurang layak. Dimana, BNNP Riau tidak memiliki ruang tahanan/sel, sehingga tahanan yang ditangkap oleh bidang pemberantasan harus di titipkan di ruang tahanan Polda Riau.
- c. Terbatasnya Kendaraan operasional dan Alat pendukung kegiatan bidang yang ada di BNNP Riau (hanya memiliki 4 mobil untuk operasional).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

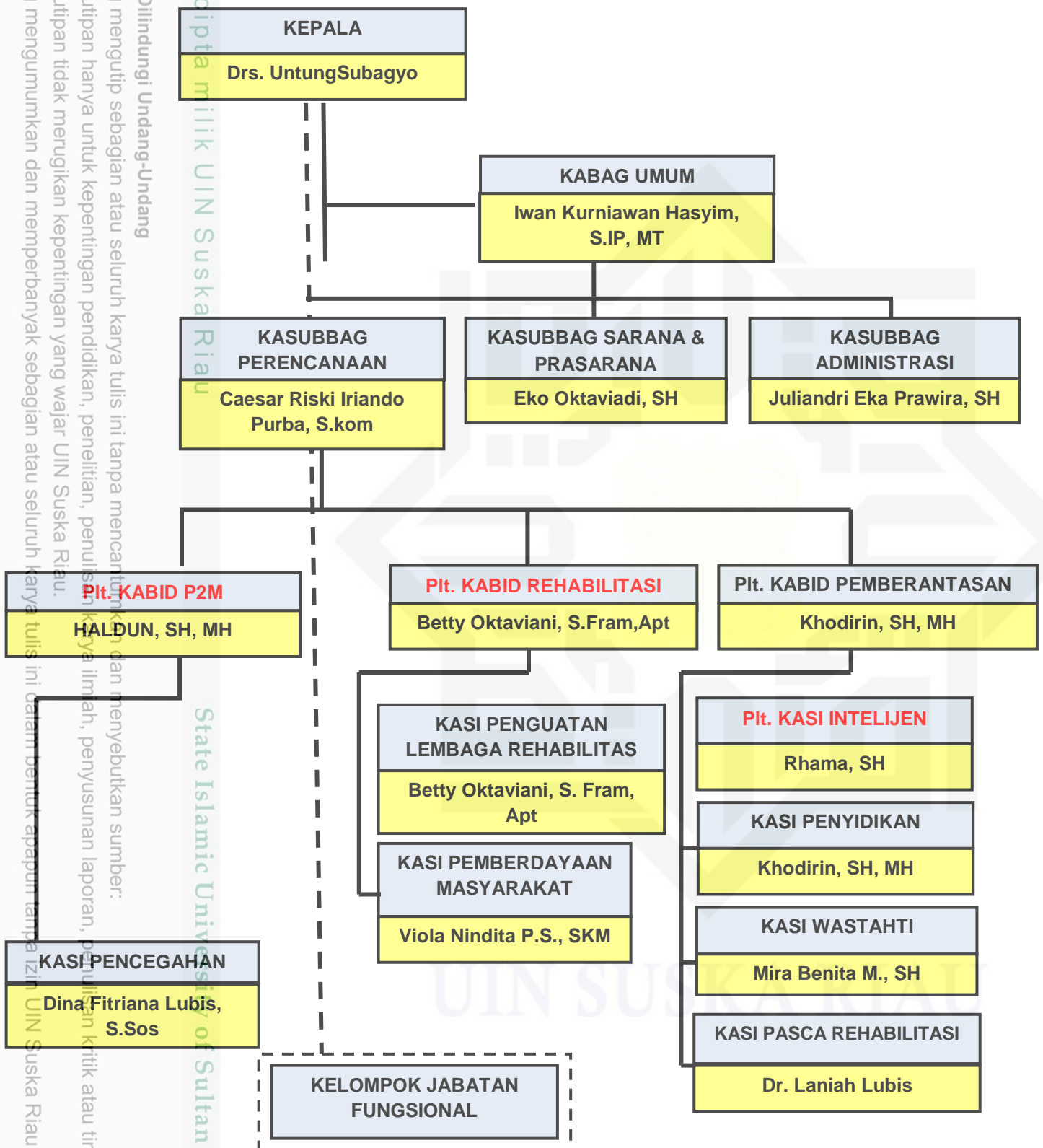
d. Terbatasnya Senjata Api yang dimiliki (1 Pucuk Handgun HK-P30 dan 1 Pucuk Submachine gun HK-MP5) dan tidak adanya rompi anti peluru yang diperlukan untuk menunjang kinerja bidang pemberantasan dan upaya penegakan hukum.

e. Belum tersedianya Balai Rehabilitasi yang bertaraf dan berstandar Nasional di Provinsi Riau khususnya di BNNP Riau, sehingga pecandu dan penyalahguna yang memerlukan perawatan dan rehabilitasi intensif harus dikirim ke balai rehabilitasi BNN di Lido, Bogor.



4.7 Struktur Organisasi BNN Provinsi Riau

Adapun struktur organisasi BNN Provinsi Riau adalah sebagai berikut :





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa dan temuan serta pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dalam bab ini peneliti akan membuat suatu kesimpulan serta memberikan saran-saran yang diharapkan bisa mampu mendatangkan manfaat.

Adapun hasil dari penelitian ini dapat peneliti sajikan antara lain sebagai berikut:

1. Program Pencegahan

Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan atau perbuatan menahan sesuatu tidak terjadi. Begitu juga dengan proram pencegahan yang di lakukan oleh BNN Provinsi Riau yang mana adanya program sosialisasi, pembentukan satgas dan kegiatan penyuluhan. Kegiatan sosialisasi merupakan kegiatan yang menyebarluaskan informasi mengenai bahaya narkoba secara langsung dan melalui media sosial. Dan relawan anti narkoba sebagai bentuk perpanjangan tangan dari BNNP Riau dalam menjalankan tugasnya mendapatkan informasi-informasi mengenai peredaran narkoba . Serta penyuluhan merupakan kegiatan yang memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat akan bahayanya narkoba yang akan mengancam keluarga dan masa depan generasi bangsa.

2. Kerjasama

Dalam mencegah dan memberantas narkoba BNN melakukan kerjasama, baik itu dengan pihak internal maupun eksternal. kerjasama internal yaitu



kerjasama antara bidang-bidang yang ada di BNN tersebut bahkan kerjasama antara BNNP dengan BNNK. Dan kerjasama dengan pihak eksternal yaitu kerjasama dengan kepolisian, lembaga pendidikan, instansi pemerintah dan swasta serta kerjasama dengan masyarakat.

3. Faktor penghambat

Faktor-faktor penghambat BNN dalam menjalankan tugasnya adalah kurangnya informasi yang diberikan oleh masyarakat mengenai kasus penyalahgunaan narkoba bahkan terbatasnya dana dan terbatasnya SDM yang dimiliki oleh BNNP Riau sehingga sulit untuk menjangkau kasus peredaran dan penyalahgunaan narkoba dimana cakupan wilayahnya sangat luas.

6.2 Saran

- a. Dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan lain-lain, BNNP Riau perlu memperhatikan kegiatan yang dilakukan apakah berdampak terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkoba setiap tahunnya.
- b. Kerjasama antara BNNP Riau dengan Instansi-instansi yang berada di Provinsi Riau di tingkatkan lagi. Contohnya saja dengan pihak Bea Cukai.
- c. Perlunya kegiatan rutin serta prioritas utama pemerintah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba yang semakin marak terjadi.
- d. Perlunya transparansi pemerintah terhadap kasus narkoba yang terjadi di Provinsi Riau.
- e. Partisipasi dan kepedulian dari masyarakat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan P4GN. Diharapkan masyarakat lebih peduli terhadap keluarga dan lingkungan sekitar agar rantai peredaran narkoba dapat terungkap.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Kepada setiap keluarga diharapkan untuk memperhartikan tingkah laku anak-anaknya, berikanlah mereka edukasi mengenai bahaya narkoba, supaya masa depan mereka lebih cerah lagi dan jauh dari tindak pidana narkoba.

g. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas area penelitian terkait permasalahan narkoba yang merupakan permasalahan yang harus dapat perhatian lebih dari pemerintah.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Bin Muhammad. 2016. *Tafsir Ibnu Katsir Edisi 10 Jilid*. Bekasi Barat : Pustaka Imam Asy-Syafi'i
- Departemen Agama RI. 2009. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar
- Kartono, Kartini. 2009 . *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja Jilid 1* Jakarta: Rajawali Pres
- Setiadi, Elly M. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya*. Jakarta : Kencana
- Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh. 1437 H. *At-Tafsir al-Muyassar* . Madinah KSA: Mushaf AQuran, .
- Siska Sulistami. 2016. *Bahaya Napza*. Jakarta: PT. Mustika Pustaka Negeri.
- Soekanto, Soejono.2010. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta

Peraturan perundang-undangan

- Inpres No.12 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan narkotika Kabupaten/ Kota.
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Jurnal

- Abdul Rahman. 2017. *Kinerja Pegawai Badan Narkotika Nasional (Bnn) Provinsi Riau Dalam Pelaksanaan Operasi Pemberantasan Di Kota Pekanbaru*. JOM FISIP. Vol. 4 No. 1. <https://jom.unri.ac.id>. Diakses pada 1 Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dani Akbar. 2017. Peranan Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Menanggulangi Peredaran Narkotika Di Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No.35 Tahun 2009 No. Tahun 2009 Tentang Narkotika. Vol. IV No. 2 . <https://scholar.google.co.id>. Diakses pada 27 Oktober 2019.

Haryanto Bayu Puji. 2018. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia. Vol. 1. No. 1. <https://scholar.google.co.id>. Diakses pada 4 Januari 2020.

Tri Wulandari. 2016. Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Narkoba pada Kalangan Pelajar di BNNP DIY. <https://scholar.google.co.id>. Diakses pada 4 Januari 2020.

Skripsi

Faizin. 2017. *Peran Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau dalam Mencegah dan Memberantas Penyalahgunaan Narkoba*. Skripsi. Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Maisaroh Siti. 2017. Peran badan narkotika Nasional Provinsi Riau dalam mencegah penyalahgunaan narkotika di Provinsi Riau. Skripsi. Pekanbaru: UIN Suska Riau

Nugraha, Aliyyul Qayyum. *Penanggulangan Peredaran Narkoba Dalam Lingkup Kerja Kepolisian Republik Indonesia*. Skripsi Sarjana Hukum (SH) Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UAlauddin Makassar

Internet

Instagram BNNP Riau

Latif Abdul. 2019. Riau Rangking 5 Besar Peredaran Narkoba <http://pekanbaru.riaupos.com> . (diakses pada 1 Januari 2020)

Suryadi Chaniago. Riau masih Darurat Narkoba, BNNP Riau Rilis Capaian Selama tahun 2019. <http://riaumandiri.id>. Diakses pada 4 Januari 2020



Pedoman wawancara

Nama informan :
 Identitas/ jabatan :
 Hari/ tanggal :
 Tempat :

1. Berdasarkan peraturan presiden no 23 tahun 2010 menjelaskan bahwa dalam memberantas peredaran narkoba BNN melakukan kerjasama dengan beberapa pihak. Kerja sama seperti apa yang dilakukan BNN ? dan dengan siapa saja bekerjasama?
2. program pencegahan seperti apa saja yang dilakukan oleh BNN? Dan siapa saja yang menjadi sasaran utama dalam melakukannya?
3. Kenapa dari tahun-tahun kasus peredaran narkoba di pekanbaru terus meningkat? Berdasarkan hasil penelitian di tahun 2017-2019 kasus peredaran narkoba di provinsi riau terus meningkat?
4. Kenapa seolah-olah menurut pandangan awam narkoba itu sangat mudah masuk ke provinsi riau?
5. Dengan banyaknya peredaran narkoba tentu juga penyalahguna narkoba semakin marak . kenapa sebagian besar penyalahguna merupakan remaja dan berpendidikan tinggi (yang mana mereka merupakan modal bangsa)
6. Kendala seperti apa saja yang di dapatkan oleh badan narkotika nasional dalam mencegah dan memberantas peredaran narkoba di provinsi riau? (sebagaimana yang kita ketahui bahwa para pengedar narkoba mempunyai jaringan yang sangat luas . dan juga banyak diberitakan bahwa para tahanan pengedar narkoba pun masih bisa mengendalikan barang haram tersebut dari balik jerusi besi.
7. Kenapa para pengedar narkoba yang di tahan masih bisa mengendalikan usahanya tersebut dalam mengedarkan narkoba?
8. Di kapolda riau juga terdapat reserse narkoba . apakah dalam melakukan penangkapan para pengedar dan penyalahgunaan narkoba ada kerjasama ?
9. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya ada terdapat BNN kota dan provinsi . apakah yang membedakan tugas dalam memberantas narkoba antara provinsi riau dan kota?

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



10. Dalam melakukan penangkapan apakah ada kerjasama yang dilakukan oleh BNN dengan para pihak-pihak yang lain?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/5908/2019
: Biasa
: **Pra Riset**

Pekanbaru, 10 Oktober 2019 M
10 Safar 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Badan Narkotika Nasional
Kota Pekanbaru
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

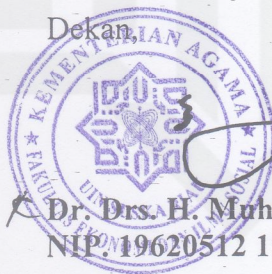
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Fikriyatul A'La
NIM. : 11675201421
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Pra Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"**Analisis Fungsi Badan Narkotika Nasional dalam Pencegahan Peredaran
Narkoba di Kota Pekanbaru**" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrandas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/487/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 23 Januari 2020 M
27 Jumadil Awwal 1441 H

Kepada
Yth. **Muslim, S.Sos, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,
Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
N a m a : Fikriyatul A'La
NIM : 11675201421
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisi Fungsi Badan Narkotika Nasional dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Provinsi Riau**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.
Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

: Un.04/F.VII/PP.00.9/7728/2019
: Biasa
: Izin Riset

Pekanbaru, 19 Desember 2019 M
22 Rabiul Akhir 1441 H

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Fikriyatul A'la
NIM. : 11675201421
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisi Fungsi Badan Narkotika Nasional dalam Rangka Pencegahan dan
Pemberantasan Peredaran Narkoba di Provinsi Riau"** Untuk itu kami mohon
kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada
mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM
NIP. 19620512 198903 1 003

Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/29678
T E N T A N G

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/7728/2019 Tanggal 19 Desember 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **FIKRIYATUL A'LA**
2. NIM / KTP : **11675201421**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISI FUNGSI BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM RANKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN NARKOBA DI PROVINSI RIAU**
7. Lokasi Penelitian : **BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI RIAU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Januari 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Jl. Pepaya No. 65 Pekanbaru - Riau

Telp. (0761) 8401491 / 43692 - Fax. (0761) 859822

email : bnnp_riau@bnn.go.id / riau_bnnp@yahoo.com

BNP RIAU

Pekanbaru, 29 Mei 2020

B/ 310 /V/Ka/Tu.00.01/2020/BNNP-R
Pelaksanaan Kegiatan
Pra Riset Mahasiswa UIN SUSKA Riau

Yth. Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau
C.q. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

Tempat

Referensi :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : 23 tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
d. Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 503/DPMPTSP/ NON IZIN-RISET/ 30151 Tanggal 27 Januari 2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi.

Sehubungan dengan rujukan diatas, bersama ini kami sampaikan bahwa mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial **An. Fikriyatul Aza** dengan **NIM 11675201421** telah melakukan pelaksanaan kegiatan Riset/ Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi di BNNP Riau dengan judul/ bidang kajian “ ***Analisis Fungsi Badan Narkotika Nasional Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Narkoba di Provinsi Riau***”.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

**a.n.Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Riau**

Iwan Kurniawan Hasyim, S.IP.,MT

Tembusan:

1. Para Kabid dan Kabag Umum BNNP Riau;
2. Para Kasi dan Kasubag BNNP Riau.

1. Diingat mengutip sebagai referensi seluruh karya tulis ini tanpa menyebutkan sumber: a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z. aa. ab. ac. ad. ae. af. ag. ah. ai. aj. ak. al. am. an. ao. ap. aq. ar. as. at. au. av. aw. ax. ay. az. ba. bb. bc. bd. be. bf. bg. bh. bi. bj. bk. bl. bm. bn. bo. bp. bq. br. bs. bt. bu. bv. bw. bx. by. bz. ca. cb. cc. cd. ce. cf. cg. ch. ci. cj. ck. cl. cm. cn. co. cp. cq. cr. cs. ct. cu. cv. cw. cx. cy. cz. da. db. dc. dd. de. df. dg. dh. di. dj. dk. dl. dm. dn. do. dp. dq. dr. ds. dt. du. dv. dw. dx. dy. dz. ea. eb. ec. ed. ee. ef. eg. eh. ei. ej. ek. el. em. en. eo. ep. eq. er. es. et. eu. ev. ew. ex. ey. ez. fa. fb. fc. fd. fe. ff. fg. fh. fi. fj. fk. fl. fm. fn. fo. fp. fq. fr. fs. ft. fu. fv. fw. fx. fy. fz. ga. gb. gc. gd. ge. gf. gg. gh. gi. gj. gk. gl. gm. gn. go. gp. gq. gr. gs. gt. gu. gv. gw. gx. gy. gz. ha. hb. hc. hd. he. hf. hg. hh. hi. hj. hk. hl. hm. hn. ho. hp. hq. hr. hs. ht. hu. hv. hw. hx. hy. hz. ia. ib. ic. id. ie. if. ig. ih. ii. ij. ik. il. im. in. io. ip. iq. ir. is. it. iu. iv. iw. ix. iy. iz. ja. jb. jc. jd. je. jf. jg. jh. ji. jj. jk. jl. jm. jn. jo. jp. jq. jr. js. jt. ju. jv. jw. jx. jy. jz. ka. kb. kc. kd. ke. kf. kg. kh. ki. kj. kk. kl. km. kn. ko. kp. kq. kr. ks. kt. ku. kv. kw. kx. ky. kz. la. lb. lc. ld. le. lf. lg. lh. li. lj. lk. ll. lm. ln. lo. lp. lq. lr. ls. lt. lu. lv. lw. lx. ly. lz. ma. mb. mc. md. me. mf. mg. mh. mi. mj. mk. ml. mm. mn. mo. mp. mq. mr. ms. mt. mu. mv. mw. mx. my. mz. na. nb. nc. nd. ne. nf. ng. nh. ni. nj. nk. nl. nm. no. np. nq. nr. ns. nt. nu. nv. nw. nx. ny. nz. oa. ob. oc. od. oe. of. og. oh. oi. oj. ok. ol. om. on. oo. op. oq. or. os. ot. ou. ov. ow. ox. oy. oz. pa. pb. pc. pd. pe. pf. pg. ph. pi. pj. pk. pl. pm. pn. po. pp. pq. pr. ps. pt. pu. pv. pw. px. py. pz. qa. qb. qc. qd. qe. qf. qg. qh. qi. qj. qk. ql. qm. qn. qo. qp. qq. qr. qs. qt. qu. qv. qw. qx. qy. qz. ra. rb. rc. rd. re. rf. rg. rh. ri. rj. rk. rl. rm. rn. ro. rp. rq. rr. rs. rt. ru. rv. rw. rx. ry. rz. sa. sb. sc. sd. se. sf. sg. sh. si. sj. sk. sl. sm. sn. so. sp. sq. sr. ss. st. su. sv. sw. sx. sy. sz. ta. tb. tc. td. te. tf. tg. th. ti. tj. tk. tl. tm. tn. to. tp. tq. tr. ts. tt. tu. tv. tw. tx. ty. tz. ua. ub. uc. ud. ue. uf. ug. uh. ui. uj. uk. ul. um. un. uo. up. uq. ur. us. ut. uu. uv. uw. ux. uy. uz. va. vb. vc. vd. ve. vf. vg. vh. vi. vj. vk. vl. vm. vn. vo. vp. vq. vr. vs. vt. vu. vv. vw. vx. vy. vz. wa. wb. wc. wd. we. wf. wg. wh. wi. wj. wk. wl. wm. wn. wo. wp. wq. wr. ws. wt. wu. wv. ww. wx. wy. wz. xa. xb. xc. xd. xe. xf. xg. xh. xi. xj. xk. xl. xm. xn. xo. xp. xq. xr. xs. xt. xu. xv. xw. xx. xy. xz. ya. yb. yc. yd. ye. yf. yg. yh. yi. yj. yk. yl. ym. yn. yo. yp. yq. yr. ys. yt. yu. yv. yw. yx. yy. yz. za. zb. zc. zd. ze. zf. zg. zh. zi. zj. zk. zl. zm. zn. zo. zp. zq. zr. zs. zt. zu. zv. zw. zx. zy. zz.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Fikriyatul A'la, anak keenam dari enam bersaudara yang lahir pada tanggal 12 Desember 1996 dari pasangan ayahanda Syafruddin dan ibunda Nelmi. Dan memiliki lima saudara bersaudara kandung yaitu Neli, Joni, Resna Wati, Rusnawati dan Niswatul.

Penulis mengawali pendidikan tahun 2003 MIN Sungai Landai Kec. Banuhampu Kab. Agam, Sumatera Barat. lulus tahun 2009, kemudian pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan SMP Negeri 1 Banuhampu, Kab. Agam dan lulus tahun 2012, pada tahun itu juga penulis melanjutkan pendidikan selanjutnya ke Pondok Pesantren Tahfizul Qur'an Mu'allim Muhammadiyah Kab. Agam kemudian lulus pada tahun 2015.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di Universitas Riau angkatan 2016 di fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Negara Strata Satu (S1), selanjutnya pada bulan Juli hingga bulan Agustus tahun 2019 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Lubuk Bilang Kec. Rambah Samo Kab. Rokan Hulu. Hingga akhirnya, pada tanggal 21 Juli 2020 penulis mengikuti ujian Sidang Skripsi di Ekonomi dan Ilmu Sosial dan dinyatakan "LULUS" serta mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan (S.Sos).